

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN LAHAN DI DESA KUALA SEMPANG KABUPATEN  
BINTAN**

**(Studi Kasus No Perkara 247/Pid.Sus/LH/2021/Pn.Tpg)**

**Oleh  
Aprijuanda  
NIM.180574201096**

**Abstrak**

Kebakaran lahan terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tindak pidana pembakaran lahan ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya Undang-Undang yang bertentangan antara Undang-Undang umum dengan Undang-Undang khusus. Seharusnya dalam kasus tersebut yang mana merupakan Tindak Pidana Khusus dan harus menggunakan Undang-Undang Khusus yang sudah ada. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim tindakan pidana pembakaran lahan di Desa Kuala Sempang, Kabupaten Bintan (Studi Kasus Perkara No. 247/Pid.Sus/LH/2021/PN Tpg). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah Hakim menilai terdapat kekurangan yang di hadirkan oleh penuntut umum yang mana hakim melihat tidak adanya dihadirkan saksi ahli lingkungan yang mana sangat memberikan keterangan penting seperti kerugian dan dampak yang didapatkan dari tindak pidana pembakaran lahan tersebut. Kesimpulannya yaitu hakim memilih Undang-Undang umum yaitu KUHP yang mana dinilai dan telah memenuhi fakta-fakta hukum yang yang terjadi. Penuntut umum dalam mendakwakan kasus tindak pidana pembakaran lahan penuh keragu-raguan sehingga penuntut umum menggunakan dua alternatif dakwaan yaitu Pasal 69 Juncto Pasal 108 UUPPLH dan alternatif kedua Pasal 188 KUHP.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Pembakaran Lahan.

**ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS FOR THE CRIMINAL  
ACTION OF LAND BURNING IN THE VILLAGE KUALA SEMPANG  
KABUPATEN BINTAN**

*(Case Study Case No 247/Pid.Sus/LH/2021/Pn.Tpg)*

**Oleh**  
**Aprijuanda**  
**NIM.180574201096**

**Abstract**

*Forest and land fires occur due to 2 (two) main factors, namely natural factors and human activities. Natural factors include the influence of El-Nino which causes a prolonged drought so that the plants become dry. This crime of forest burning has actually been regulated in Article 69 paragraph (1) letter h of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The existence of laws that conflict between general laws and special laws. It should be in that case which is a Special Crime and must use the existing Special Law. The purpose is to find out how the judge's consideration of the criminal act of burning forest and land in Kuala Sempang Village, Bintan Regency (Case Study No. 247/Pid.Sus/LH/2021/PN Tpg). The research method used is normative juridical research. The judge considered that there were shortcomings that were presented by the public prosecutor where the judge saw that there were no environmental expert witnesses who provided very important information such as the losses and impacts obtained from the crime of burning forest and land. Therefore, the judge chose a general law, namely the Criminal Code, which was assessed and had fulfilled the legal facts that occurred. The public prosecutor in indicting the criminal case of forest and land burning is full of doubts so the public prosecutor uses two alternative charges, namely Article 69 Juncto Article 108 UUPPLH and the second alternative is Article 188 of the Criminal Code.*

*Keywords: Judge's Considerations, Criminal Acts, Land Burning*